

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan sejumlah simpulan, implikasi, dan rekomendasi hasil penelitian yang dirumuskan dari deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam bab IV di atas.

A. Simpulan

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas bidang kajian eklektik yang dinamakan "*an integrated system of knowledge*", "*synthetic discipline*", "*multidimensional*", dan "kajian konseptual sistemik" memiliki ontologi yang terdiri atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai landasan pokok, Pancasila sebagai landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan normatif, dan perilaku warga negara sebagai landasan psikologis sedangkan landasan material meliputi nusantara, manusia sebagai pribadi, kekayaan alam dan budaya, kesadaran sebagai manusia, dan jatidiri sebagai bangsa.

- 1.1 Esensi ontologi PKn adalah perilaku warga negara dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dikembangkan

melalui dimensi sosiologis, psikologis, dan historis perkembangan kehidupan masyarakat dan bangsa sebagai sumber pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung bagi pembangunan karakter.

- 1.2 Ontologi PKn yang terkait dengan unsur 'ada' secara fisika dan unsur 'ada' secara metafisika sebagai nilai dan moral kebajikan hasil pemikiran kritis, argumentatif, rasional dengan pendekatan secara multidimensional, sintetik, dan terpadu sehingga memunculkan rasa kebanggaan bagi sebuah bangsa dapat membentuk karakter dan pribadi yang baik bila penerapannya dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah mempribadi dalam diri warga negara.
2. Secara fungsional, PKn memiliki dua tugas, yakni (1) tugas dalam bidang telaah untuk membangun *body of knowledge* sesuai dengan karakteristiknya sebagai *scientific boundary line* pendidikan disiplin ilmu yang dikembangkan secara *fungsional* dan/atau *hirarkhi* dan (2) tugas dalam bidang pengembangan untuk transformasi konsep, nilai, cita-cita, dan keterampilan hidup berkewarganegaraan.
3. Tiga domain program PKn yang meliputi program kurikuler, program sosial kultural, dan program akademik merupakan satu kesatuan program yang bersinergistik untuk pembangunan karakter bangsa, namun sampai saat ini sinergisme belum optimal karena masih ada persoalan yang dihadapi yang meliputi ketidaklengkapan landasan, organisasi kurikulum, kualitas buku, metodologi, dan kemampuan guru.

- 3.1 PKn sebagai domain kurikuler yang mencakup *curriculum content* dan *student behavior* yang berada pada paradigma *education about democracy* dengan sifatnya yang *exclusive* dan *formal* sedang mengalami perubahan kearah paradigma *education in democracy* atau berubah dari sifat *minimum* menjadi *moderate*.
- 3.2 Dalam konteks pembelajaran, isi (*content*) PKn dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan konteks atau lingkungan sosial budaya masyarakat (*informal content*) namun isi yang bersifat *formal structure* harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (*unnegotiated, given*) karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia sedangkan *informal content* merupakan unsur pemer kaya dan pendukung pemersatu bangsa.
- 3.3 Perubahan kurikulum dari paradigma *content-based* menjadi *competency-based* pada hakikatnya merupakan perubahan dalam paradigma pengembangan kurikulum yang berdampak terhadap mekanisme dan pendekatan pembelajaran sedangkan penerapannya memerlukan perubahan paradigma dan proses adaptasi dari para praktisi pendidikan sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial kultural kontemporer.
- 3.4 Program PKn dalam dimensi sosial kultural mencakup kegiatan untuk penanaman wawasan kebangsaan, sosial politik, bela negara, patriotisme, serta perbaikan nilai dan moral warga negara melalui berbagai organisasi kemasyarakatan yang disusun secara sistematis

dan komprehensif dengan sasaran semua warga negara yang dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

3.5 Program PKn dalam dimensi akademik meliputi program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori berlandaskan pada landasan filosofis negara, sosial kultural, landasan konstitusional, dan landasan ilmiah sebagai perekat dan simpul untuk menjaga objektivitas dan universalitas keilmuan.

4. Fokus pembangunan karakter bangsa melalui PKn adalah perilaku warga negara karena karakter bangsa yang baik akan terbentuk apabila karakter warga negara sudah baik, namun PKn bukan satu-satunya wahana untuk membangun karakter sebab hakikat karakter tidak hanya terkait dengan kehidupan politik dan hukum dalam konteks kehidupan bernegara melainkan termasuk karakter dalam kehidupan di lingkungan keluarga.

4.1 Pembangunan karakter bangsa merupakan tugas yang kompleks, komprehensif, multidimensional, multidisiplin, multipersonal, dan multiinstitusi sesuai dengan lingkungan dimana warga negara itu berkesempatan tumbuh dan berkembang.

4.2 PKn sebagai program untuk membangun karakter warga negara yang berciri kajian multidimensional berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan bela negara, pendidikan politik dan hukum untuk

membentuk warga negara yang peka terhadap lingkungan strategis, memiliki kemampuan dan keterampilan, peka dalam menyerap informasi dengan cepat, memiliki sistem manajemen informasi, memiliki hubungan interpersonal dan partisipasi sosial, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan etika demokrasi bangsa Indonesia.

4.3 Pembangunan karakter bangsa melalui PKn diarahkan sebagai wahana untuk mengembangkan *state of mind*, konsep pencerdasan, dan laboratorium demokrasi, bukan alat indoktrinasi kecuali dalam konteks *unavoidable indoctrination* yang diselenggarakan di tiga sarana atau lingkungan pendidikan yakni pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal, namun sarana sebagai peletak dasar pendidikan adalah lingkungan keluarga (informal).

5. Pembangunan karakter bangsa sebagai upaya mengembangkan potensi kepribadian manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang konsisten dipengaruhi oleh aspek psikologis, kesehatan mental, dan pribadi individu warga negara, serta konteks kehidupan masyarakat.

5.1 Faktor eksternal dalam pembangunan karakter bangsa meliputi nilai budaya, adat, tatakrama, budi pekerti, nilai agama dan nilai yang baik lainnya yang dianut oleh sebuah bangsa agar bangsa tersebut memiliki nilai-nilai sebagaimana yang dimiliki oleh generasi terdahulu.

5.2 Setiap individu warga negara memiliki potensi internal yang dapat membentuk karakter yang baik, tetapi pengaruh eksternal memiliki

pengaruh yang lebih dominan dalam membentuk kepribadian dan karakter individu warga negara bahkan karakter bangsa.

5.3 Kesehatan mental akan berpengaruh terhadap karakter individu warga negara sedangkan kesehatan mental yang tinggi memiliki tingkat ketahanan yang dapat memperbaiki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap karakter bangsa.

5.4 Karakter warga negara demokratis yang dapat membangun karakter bangsa Indonesia meliputi rasa hormat dan tanggung jawab kepada sesama, bersikap kritis terhadap kenyataan empiris, membuka adanya dialog, menumbuhkan sikap kemandirian, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, dan menempatkan sesuatu secara profesional dan proporsional.

6. Pembangunan karakter bangsa di Indonesia telah dimulai sejak jauh sebelum berdirinya NKRI yakni sejak masa Kebangkitan Nasional yang ditandai oleh pelaksanaan 15 butir program Budi Utomo tahun 1908 dengan tujuan pokok membangkitkan kesadaran seluruh rakyat penghuni wilayah nusantara yang terjajah, agar tumbuh semangat kesadaran akan harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang mewarisi watak dan kepemimpinan dari kerajaan-kerajaan besar di wilayah nusantara.

6.1 Pengalaman sejarah masa penjajahan oleh bangsa Barat di wilayah nusantara yang cukup lama telah banyak mempengaruhi karakter bangsa Indonesia bahkan kebiasaan perilaku penjajah dan terjajah

telah mewarnai dan melekat dalam pola sikap dan perilaku kehidupan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan namun unsur agama telah menjadi perekat dalam menumbuhkan kerjasama selain unsur budaya dan kepentingan politik.

6.2 Pada masa jauh sebelum kemerdekaan dan/atau masa penjajahan, penduduk yang menghuni wilayah nusantara adalah bangsa-bangsa yang merdeka namun dalam kurun waktu ratusan tahun, penduduk di wilayah nusantara telah mengalami beberapa kali perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan sosial, politik, agama, dan budaya karena pengaruh penjajahan.

6.3 Misi penjajah yang meliputi *glory*, *gold*, dan *gospel* telah mengubah nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan harga diri rakyat di wilayah nusantara bahkan telah menimbulkan perubahan peta dunia namun sekaligus memberikan inspirasi kepada para perintis, penegak, dan pejuang kemerdekaan untuk mendirikan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Sejak setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, upaya pembangunan karakter bangsa melalui jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam mata pelajaran Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar dan menengah serta pengembangan kepribadian melalui Pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewiraan, Pendidikan Agama, Pendidikan

Budi Pekerti, Pendidikan Bahasa, dan Pendidikan Budaya Dasar pada tingkat perguruan tinggi.

7.1 Tantangan PKn dalam upaya pembangunan karakter bangsa di Indonesia meliputi: (1) membangun pribadi-pribadi yang *committed* terhadap negaranya; (2) implementasi gagasan para pendiri negara; (3) komunikasi antara *global reformers* dan praktisi di lapangan; (4) kejelasan landasan pengembangan akibat perubahan paradigma; (5) kesepahaman antara masyarakat dan birokrat; (6) kondisional birokrasi saat proses demokratisasi; dan (7) implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa para era globalisasi.

7.2 Pembangunan karakter bangsa akan terhambat dalam kondisi bangsa yang tidak ada idealisme, tidak ada patriotisme, tidak ada nasionalisme, tidak ada perilaku disiplin, dan tidak ada tanggung jawab kepada sesama manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Implikasi

Merujuk pada temuan penelitian, pembahasan penelitian, dan simpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa implikasi sebagai berikut.

1. Pengembangan PKn di Indonesia memerlukan sebuah paradigma baru yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembangan obyek telaah PKn khususnya aspek idiil hendaknya merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai landasan pokok, Pancasila sebagai landasan filosofis,

UUD 1945 sebagai landasan normatif, dan perilaku warga negara sebagai landasan psikologis. Artinya, pengembangan PKn sebagai program kurikuler, program sosial kultural, dan program akademik harus berlandaskan pada dan tidak bertentangan dengan landasan pokok, filosofis, normatif, dan psikologis. Sedangkan, pengembangan materi pembelajaran untuk pembangunan karakter bangsa seyogianya menjadikan landasan material yang meliputi aspek nusantara, manusia sebagai pribadi, kekayaan alam dan budaya, kesadaran sebagai manusia, dan jatidiri sebagai bangsa sebagai obyek telaah.

2. Dua tugas PKn, yakni dalam bidang telaah dan pengembangan membawa implikasi terhadap para komunitas akademik untuk mengembangkan keilmuan PKn baik secara idiil-filosofis maupun teoritis-konseptual secara lebih mendalam sehingga body of knowledge PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu akan semakin kokoh dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya sebagai *scientific boundary line*. Sedangkan tugas bidang pengembangan membawa implikasi terhadap para praktisi PKn di lapangan khususnya di lembaga persekolahan maupun lembaga pendidikan guru untuk melakukan proses pembangunan karakter bangsa yang sesuai dengan landasan pokok, filosofis, normatif, psikologis, dan material serta konteks dan masalah kehidupan peserta didik.
3. Isi (*content*) materi pembelajaran PKn yang bercirikan *formal structure* harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (*unnegotiated, given*) untuk semua peserta didik dan/atau semua jenjang dan satuan pendidikan di seluruh tanah air Indonesia bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia

karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Isi materi ini hendaknya dikembangkan oleh para ahli, pengembang kurikulum, di tingkat nasional. Sekaitan dengan hal tersebut, semua praktisi pendidikan hendaknya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap isi materi tersebut. Sebaliknya, isi materi pembelajaran yang bersifat *informal content* memungkinkan akan berbeda-beda karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial budaya setempat. Pengembangan isi materi ini merupakan tugas dari para pengembang kurikulum di tingkat meso dan/atau mikro atau pendidik di tiap jenjang dan satuan pendidikan masing-masing.

4. Perubahan kurikulum dari paradigma *content-based* menjadi *competency-based* membawa implikasi perlunya perubahan pola pikir bagi setiap praktisi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional termasuk pengembangan substansi kajian, kegiatan pembelajaran, metode, dan evaluasi serta mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
5. Perilaku warga negara sebagai fokus pembangunan karakter bangsa membawa implikasi bahwa upaya pembangunan karakter bangsa merupakan proses yang kompleks, komprehensif, multidimensional, multidisiplin, multipersonal, dan multiinstitusi. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan karakter seyogianya melibatkan pihak-pihak yang terkait secara komprehensif, multidimensional, multidisiplin, multipersonal, dan multiinstitusi.

6. Faktor eksternal lebih kuat (dominan) pengaruhnya terhadap pengembangan kepribadian bangsa. Dalam hal ini, upaya membangun karakter menjadi sangat penting dan menentukan bagi perkembangan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, faktor eksternal dalam pembangunan karakter bangsa yang meliputi nilai budaya, adat, tatakrama, budi pekerti, nilai agama dan nilai yang baik lainnya perlu diadopsi dan diadaptasi menjadi bahan pembelajaran.
7. Watak dan kepemimpinan dari kerajaan-kerajaan besar nusantara, kemerdekaan penduduk nusantara, dan unsur agama sebagai perekat dalam menumbuhkan kerjasama selain unsur budaya dan kepentingan politik seyogianya menjadi inspirasi dan pengalaman berharga yang dapat dijadikan bahan telaah dalam upaya pembangunan karakter bangsa di era kemerdekaan.

C. Rekomendasi

Merujuk pada simpulan dan uraian implikasi di atas, rekomendasi yang diusulkan sebagai berikut.

1. Komunitas akademik dalam bidang PKn yang ada di perguruan tinggi (LPTK) dianjurkan agar mengembangkan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam lingkup kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi secara lebih mendalam sesuai dengan karakteristik kajian ini sebagai *scientific boundary line*. Pengembangan PKn ini hendaknya berlandaskan pada NKRI sebagai landasan pokok, Pancasila sebagai

landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan normatif, dan perilaku warga negara sebagai landasan psikologis.

2. Komunitas akademik dan praktisi PKn di tiap jenjang dan satuan pendidikan seyogianya mengembangkan program PKn melalui dua tugas, yakni tugas bidang telaah dan bidang pengembangan baik dalam dimensi kurikuler, sosial kultural maupun akademik secara sinergis. Pengembangan bidang telaah berlandaskan pada landasan *pokok, filosofis, normatif, psikologis, dan material* sedangkan bidang pengembangan berfokus pada pembangunan perilaku warga negara yang dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap dan nilai (*attitudes and values*) peserta didik.
3. Para pengembang kurikulum di tingkat nasional hendaknya mengembangkan kompetensi dan substansi kajian materi pembelajaran PKn yang bercirikan *formal structure* yang harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (*unnegotiated, given*) sehingga menjadi standar nasional yang akan menjadi acuan atau pedoman guru dalam pembelajaran untuk semua peserta didik dan/atau semua jenjang dan satuan pendidikan di seluruh tanah air bahkan untuk seluruh warga negara Indonesia.
4. Para pengembang kurikulum di tingkat nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), hendaknya mengembangkan standar kompetensi mata pelajaran PKn dan standar tenaga pendidik yang memanfaatkan landasan-landasan idiil bidang telaah sebagai rujukan sehingga pengembangan *formal structure* tidak menyimpang dari

hakikat PKn sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia.

5. Pakar di universitas dan/atau pengembang kurikulum di tingkat birokrasi perlu mengembangkan PKn yang sesuai dengan paradigma *competency-based* namun berlandaskan pada landasan pokok, filosofis, normatif, psikologis, dan material. Hal ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pola pikir yang dialami para praktisi pendidikan di jenjang dan satuan pendidikan.
6. Para pengembang kurikulum dan penulis buku teks PKn hendaknya mengembangkan PKn untuk peserta didik yang ada di tiap satuan pendidikan berlandaskan pada landasan pokok, filosofis, normatif, psikologis, dan material serta karakteristik peserta didik sebagai *informal structure*.
7. Lembaga/instansi pemerintah dan swasta hendaknya mengembangkan program PKn dalam dimensi sosial kultural secara sinergistik yang mencakup kegiatan untuk penanaman wawasan kebangsaan, sosial politik, bela negara, patriotisme, serta perbaikan nilai dan moral warga negara dengan sasaran semua warga negara yang dilakukan secara berkesinambungan.
8. Pakar sebagai *global reformers*, pengembang kurikulum, dan praktisi dianjurkan agar mengembangkan PKn sebagai program kurikuler, program sosial-kultural dan program akademik dilakukan secara

sinergistik sehingga penyelenggaraan PKn dalam rangka membangun karakter bangsa tidak berjalan secara sendiri-sendiri.

9. Pakar peneliti yang ada di program studi S1, S2, dan S3 PKn agar mengembangkan bidang telaah PKn melalui kajian aspek idiil-filosofis dan teoritis-konseptual yang lebih mendalam dan luas untuk memperkokoh *body of knowledge* PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan merujuk pada hipotesis sementara hasil temuan yang ditawarkan dalam disertasi ini.
10. Para pengambil kebijakan dan pakar hendaknya mulai mempertimbangkan program kurikuler PKn di lingkungan pendidikan nonformal, khususnya yang terkait dengan program sosial-kultural yang selama ini terabaikan setelah program penataran P4 yang dikelola oleh BP7 dibubarkan.